

RENCANA STRATEGIS 2015-2019
KEDEPUTIAN BIDANG
INFORMASI DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

JAKARTA

2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
1.3 Hasil yang telah dicapai	4
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	8
2.1 Visi	8
2.2 Misi	8
2.3 Tujuan	9
2.4 Sasaran Strategis	9
2.5 Indikator Kinerja	9
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN IPS	12
BAB IV PENUTUP	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang pertama kali dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional untuk melanjutkan tugas dan fungsi pemerintah di bidang Standardisasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Setelah penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI), dasar hukum pembentukan BSN kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan yang terakhir sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dasar hukum pembentukan BSN kemudian diperbaharui kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemerintah Non Kementrian.

Dalam rumusan tugas pokok, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan uraian tugas BSN yang ditetapkan pada dasar hukum pembentukan organisasi BSN sebagaimana tersebut di atas, ruang lingkup Standardisasi Nasional masih mengacu pada PP No. 102 Tahun 2000, yang mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu. Dengan penetapan UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam PP No. 102 Tahun 2000 diperluas cakupannya menjadi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK).

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam UU No. 20 Tahun 2014 mencakup seluruh aspek perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan standar, pengawasan penerapan standar, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi, pengembangan bahan acuan, serta evaluasi efektifitas penerapan standar, dan pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri

Untuk mencapai tujuan tersebut, BSN mempunyai visi tahun 2015-2019 yaitu “Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”. Yang dimaksud dengan infrastruktur mutu nasional yang handal adalah peran standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keamanan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; melindungi pasar domestik serta melakukan penetrasi ke pasar global.

Untuk mendukung visi tersebut, maka BSN mempunyai misi yang memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian yaitu:

1. Merumuskan, menetapkan, dan memelihara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan.
2. Mengembangkan dan mengelola sistem penerapan standar, penilaian kesesuaian, dan ketertelusuran pengukuran yang handal untuk mendukung implementasi kebijakan nasional di bidang standardisasi dan pemangku Kepentingan.
3. Mengembangkan budaya, kompetensi, dan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas implementasi sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian

Dalam melaksanakan misi ke 3 (tiga) tersebut di atas, Kepala BSN dibantu oleh Deputi Bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan

pemasyarakatan standardisasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
- c. pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
- d. penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi dibantu oleh 2 pusat yang terdiri dari :

- a. Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi;
- b. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Terbangunnya budaya standar merupakan potensi untuk dapat mengembangkan, menerapkan dan memanfaatkan infrastruktur mutu secara efisien dan efektif, agar dapat setara dengan bangsa-bangsa lain di manca negara. Membangun budaya standar merupakan suatu proses panjang yang harus dilakukan secara konsisten, berkesinambungan dan perlu dimulai sejak usia dini, dengan cara memperkenalkan standar untuk meningkatkan pemahaman (*Awareness*) masyarakat tentang arti dan manfaat standar bagi kehidupan dan kesejahteraan bangsa; menumbuhkan minat (*Interest*) masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang standar dan standardisasi; membuka akses untuk memfasilitasi keinginan (*Desire*) masyarakat guna mendapatkan

informasi, konsultasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan di bidang standardisasi; serta memberikan apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat yang telah melakukan aksi (*Action*) positif untuk berpartisipasi/berperan serta dalam berbagai kegiatan standardisasi sesuai bidangnya masing-masing.

Adapun permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- a. Belum terbangunnya budaya standar di kalangan masyarakat Indonesia yang sejalan dengan tuntutan perkembangan global, untuk dapat setara dengan bangsa lain di dunia;
- b. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya standar, ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran dan permasalahan di lapangan, khususnya terkait dengan SNI;
- c. Partisipasi masyarakat dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) masih relatif rendah;
- d. Ketersediaan sumber daya yang tidak sebanding dengan tuntutan penyebaran informasi ke seluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan untuk memberikan kemudahan akses dan penyebaran informasi secara cepat dan akurat dalam rangka pembudayaan standar dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK).

1.3. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Hasil yang telah dicapai pada periode 2009-2014 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam membangun budaya standar :
 - **BSN secara konsisten mengkampanyekan SNI** melalui berbagai kegiatan promosi dan edukasi publik yang gencar dilakukan di berbagai daerah dan melalui berbagai media komunikasi, agar masyarakat/konsumen mengutamakan standar dalam memilih produk, serta mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri yang ber-SNI. Dampak positif yang dihasilkan a.l. SNI sudah memasyarakat dan menjadi 'buah bibir'/dikenal masyarakat secara lebih luas, serta menjadi faktor pasar yang perlu dipertimbangkan dalam memilih produk yang berkualitas;

- **Menggagas Gerakan Nasional Penerapan SNI (GENAP SNI)** yang dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden RI pada tahun 2010, dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, dengan mengkampanyekan penerapan SNI dan menyediakan paket informasi yang terkait dengan SNI di sektor prioritas, serta secara aktif mengajak para stakeholder (Pemerintah, Pelaku Usaha, Akademisi, dan Konsumen) untuk memperkuat daya saing, agar produk kita mampu bersaing dengan produk bangsa lain.

b. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat :

BSN telah membuka akses & pelayanan publik untuk memfasilitasi keinginan (*Desire*) masyarakat guna mendapatkan informasi, konsultasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan di bidang SPK melalui berbagai sarana, prasarana dan dukungan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi SPK kepada masyarakat, antara lain dengan :

- **Memperluas akses informasi ke berbagai daerah**, sejak tahun 2012 BSN mengembangkan simpul jejaring informasi Standardisasi (INSTANET) dan “SNI Corner” yaitu suatu outlet layanan informasi SNI di berbagai institusi di daerah untuk mendekatkan SNI kepada para penggunanya. Tahun 2014, BSN menjalin kerjasama dengan PT POS Indonesia dan membuka Layanan Informasi Terpadu (LITe) di BSN sebagai *one stop service* di bidang Standardisasi, Akreditasi, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- **Memanfaatkan media sosial** (email, youtube, facebook, twitter) untuk penyebarluasan informasi tentang standardisasi; mengembangkan *Video Conference* dengan menggunakan jaringan internet *broadband* untuk memfasilitasi rapat/pertemuan jarak jauh di tingkat internasional antar negara bahkan dengan berbagai negara. Ide ini merupakan langkah cerdas yang sangat efisien dan efektif dan dapat dimanfaatkan di dalam negeri;
- **Menjalin kemitraan** dengan MASTAN (Masyarakat Standardisasi Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), asosiasi dan berbagai komunitas, untuk meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SNI.
- **Memberikan Apresiasi atau penghargaan** kepada masyarakat yang telah melakukan aksi (*Action*) positif untuk berpartisipasi/berperan serta dalam berbagai kegiatan standardisasi, dengan merekrut dan mempromosikan para

penerima 'SNI Award' yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari Pemerintah RI sebagai pelaku usaha yang berkinerja baik dan secara konsisten menerapkan SNI, serta menjadikan mereka sebagai Role Model dalam penerapan SNI. *Success story* para penerima SNI Awards ini pun dikemas dalam berbagai bentuk publikasi sebagai bahan pembelajaran bagi penerap SNI lainnya.

c. Dalam meningkatkan kompetensi SDM di bidang SPK :

BSN berkomitmen tinggi untuk menumbuhkan minat (*Interest*) masyarakat meningkatkan pengetahuan tentang SPK, melalui jalur pendidikan formal dan non formal, antara lain:

- **Mengembangkan pengetahuan tentang Standardisasi sebagai mata kuliah/pembelajaran di berbagai Perguruan Tinggi**, dengan mengembangkan kurikulum Pendidikan tentang Standardisasi dan menyusun buku "Pengantar Standardisasi" sebagai bahan ajar di Perguruan Tinggi; sampai dengan saat ini BSN sudah menjalin kerjasama dengan 42 Perguruan Tinggi di Indonesia dan sudah memperluas penyebaran materi pembelajaran secara elektronik, dalam bentuk *e-book* dan *e-learning*;
- **Memberikan pelatihan teknis di bidang SPK** kepada para pemangku kepentingan, baik melalui pelatihan reguler yang diselenggarakan BSN maupun *in house training* yang dilakukan atas permintaan *stakeholders*; yang difasilitasi dengan pengembangan registrasi *on-line* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana publik dapat dengan mudah mencari, mendaftar dan mengikuti pelatihan standardisasi yang dibutuhkan. Dampak positifnya jumlah peserta pelatihan teknis di bidang SPK meningkat dari tahun ke tahun.
- **Memperkenalkan Standardisasi di Sekolah Menengah**, a.l. dengan meluncurkan buku 'SMK Mengenal SNI' yang sudah diterapkan di beberapa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Jabodetabek; melakukan Edukasi standardisasi kepada siswa sekolah menengah melalui ajang Kompetisi Standardisasi yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan dua tim dari Indonesia untuk mengikuti ajang olimpiade standardisasi tingkat Internasional di Korea Selatan, tahun 2014 Tim Indonesia berhasil meraih medali Emas dan Perak.

- **Menumbuhkan minat anak-anak di bidang standardisasi sejak usia dini**, dengan menanamkan Nilai-nilai budaya standar melalui kegiatan ekstra kurikuler “Jambore untuk Generasi Muda (GEMA) SNI” dengan konsep bermain sambil belajar. Dalam kegiatan ini, siswa dan guru diajak mengunjungi Industri Penerap SNI yang produknya sudah di kenal oleh anak-anak, seperti makanan, minuman, dan peralatan olah raga, untuk dapat melihat dan mendapat penjelasan langsung dari produsennya tentang bagaimana standar bekerja dalam proses produksinya; dilanjutkan dengan berbagai acara lomba, permainan dan dongeng yang terkait dengan standar. Kegiatan ini cukup efektif dan banyak diminati oleh siswa dan guru, karena mereka mendapatkan nilai tambah pengetahuan baru yang tidak didapat di sekolah.

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Dalam mendukung Visi BSN 2015-2019 yaitu :

***Terwujudnya infrastruktur mutu nasional yang handal
untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa***

Kedeputian IPS Menetapkan Visi Tahun 2015 – 2019 yaitu:

Meningkatnya budaya standar di Masyarakat

Dengan meningkatnya budaya standar di masyarakat maka kualitas hidup bangsa juga akan meningkat. Karena masyarakat sadar bahwa standar mampu member perlindungan kepada masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan, keamanan masyarakat dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, serta menyelaraskan dengan misi BSN diperlukan tindakan nyata sesuai tugas dan fungsi Kedeputian IPS:

***Mengembangkan budaya standar, kompetensi dan
sistem informasi di bidang standarisasi dan
penilaian kesesuaian***

2.3. TUJUAN

Melalui pelaksanaan Misi dalam rangka mewujudkan Visi 2015 -2019, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kedeputian IPS, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode 2015 – 2019 adalah:

Meningkatkan persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui edukasi publik dan pemanfaatan sistem informasi SPK

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis (*outcome*) Kedeputian IPS adalah meningkatnya persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui penyebaran informasi dan dokumentasi, pendidikan, pelatihan serta pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Secara spesifik, yang dimaksud dengan 'masyarakat' di dalam sasaran strategis adalah para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang SPK, yaitu Pemerintah (Regulator); Pelaku Usaha (Industri); Pakar (Tenaga ahli/Akademisi) dan Publik (masyarakat umum/konsumen).

2.5. INDIKATOR KINERJA

Sebagai indikator kinerja tercapainya tujuan tersebut di atas berikut adalah indikator kinerja Kedeputian IPS:

- ***Stakeholder Perspective***

1. **Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI**

Tingkat persepsi ini diperoleh melalui survei dengan hasil berupa skor indeks persepsi dengan skala 1-5.

- ***Customer Perspective***

2. **Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian.**

Tingkat persepsi masyarakat ini diperoleh melalui survei dengan hasil berupa skor indeks persepsi dengan skala 1-

3. Indeks kepuasan pelanggan layanan informasi standardisasi dan pelatihan bidang SPK

Indeks Kepuasan pelanggan layanan informasi standardisasi dan pelatihan di bidang SPK diperoleh melalui data survey kepuasan pelanggan dengan angka skor indeks (skala 100).

- ***Internal Process Perspective***

4. Jumlah masyarakat yang mendapat e dukasi dan partisipasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

Jumlah pada indikator ini dihitung dari jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang SPK yang sumber datanya diperoleh dari data masyarakat yang mendapat edukasi baik *online* maupun *offline* dan berperan di bidang SPK dari seluruh unit kerja.

5. Jumlah akses informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis TIK

Jumlah pada indikator ini diperoleh dari jumlah akses terhadap informasi SPK yang datanya bersumber dari data Pusido dan pusat-pusat lain yang melakukan akses informasi SPK.

- ***Learning and Growth Perspective***

6. Presentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi IPS yang meningkat kompetensinya

Rumus dari Presentase ASN Deputi IPS yang meningkat kompetensinya adalah sebagai berikut:

$$P = \left(\frac{x}{y} \right) \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Presentase ASN Deputi yang meningkat kompetensinya

X= Jumlah ASN Deputi IPS yang mengikuti
diklat/workshop/sosialisasi/lainnya sejenis

Y = Jumlah ASN Deputi IPS

7. Realisasi Anggaran Deputi IPS

Rumus dari Realisasi anggaran Deputi IPS adalah sebagai berikut:

$$P = \left(\frac{x}{y} \right) \times 100 \%$$

Keterangan:

P = Presentase Realisasi Anggaran Deputi IPS

X = Realisasi Anggaran Deputi IPS sesuai SP2D

Y = Pagu Anggaran Deputi IPS

8. Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Deputi IPS

Perhitungan indikator ini adalah dari Jumlah sistem aplikasi dan pengembangannya yang disediakan Deputi IPS dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas (kumulatif) yang sumber datanya diperoleh dari data jumlah aplikasi yang disediakan dan dimanfaatkan di lingkungan Deputi IPS.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEDEPUTIAN IPS

Kebijakan dan strategi pada dasarnya merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya untuk melaksanakan misi dalam rangka untuk mencapai visi, tujuan dan sasaran organisasi. Kebijakan dan Strategi Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi selama periode tahun 2015 sampai 2019 di fokuskan pada upaya yang menyeluruh dan terpadu untuk melaksanakan misi dan mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi.

Untuk melaksanakan misi mengembangkan budaya standar, kompetensi dan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi mempunyai sasaran strategis meningkatnya persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui penyebaran informasi dan dokumentasi, pendidikan, pelatihan serta pemasarakatan.

Dalam upaya membangun budaya standar, perlu langkah awal yang dilakukan dengan mengacu pada konsep A-I-D-A (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk membangun budaya standar yaitu:

- memperkenalkan standar untuk meningkatkan kesadaran (*Awareness*) masyarakat tentang arti dan manfaat standar bagi kehidupan dan kesejahteraan bangsa;
- menumbuhkan minat (*Interest*) masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang standar;
- membuka akses untuk memfasilitasi keinginan (*Desire*) masyarakat guna mendapatkan informasi, konsultasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan di bidang Standardisasi; serta
- memberikan apresiasi atau penghargaan kepada masyarakat yang telah melakukan aksi (*Action*) positif untuk berpartisipasi/berperan serta dalam berbagai kegiatan standardisasi di bidangnya masing-masing.

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui penyebaran informasi dan dokumentasi, pendidikan, pelatihan serta pemasarakatan SPK, Kedeputian IPS menetapkan kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK
3. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang SPK
4. Meningkatkan kemudahan, ketepatan dan kecepatan akses dan layanan informasi melalui Sistem Informasi SPK

Kebijakan tersebut untuk menunjang program Pengembangan Standardisasi Nasional yang terdiri dari 2 (dua) Kegiatan, yaitu Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi serta Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, dengan rincian Sub Kegiatan masing-masing, sebagai berikut:

1. Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, yang meliputi:

- a. Penyediaan informasi standardisasi serta dokumen referensi dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui pengelolaan dan pengembangan sumberdaya informasi standardisasi, serta layanan jasa informasi standardisasi.
- b. Pendayagunaan dan diseminasi informasi SPK:
 - 1) Pengembangan kemasan informasi SPK,
 - 2) Diseminasi informasi SPK,
 - 3) Penguatan jejaring informasi INSTANET,
 - 4) Pengembangan SNI Corner.
- c. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi SPK, melalui:
 - 1) Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi SPK,
 - 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem basis data dan jaringan komunikasi SPK.
 - 3) Pengembangan informasi berbasis elektronik dan non elektronik untuk publikasi standardisasi.
 - 4) Koordinasi pengelolaan data dan informasi SPK berbasis elektronik yang disebarluaskan melalui sistem informasi SPK BSN.

2. Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi

- a. Pengembangan dan pembinaan pendidikan standardisasi baik formal maupun non formal melalui:
 - 1) Pengembangan dan pembinaan jejaring pendidikan tinggi
 - 2) Pengembangan dan pembinaan jejaring pendidikan menengah
 - 3) Pengembangan dan pembinaan jejaring pendidikan dasar
 - 4) Pengembangan dan pembinaan jejaring pendidikan umum (luar sekolah).
 - 5) Pengembangan *Distance Learning* Standardisasi
- b. Pengembangan dan pembinaan pelatihan standardisasi, melalui:
 - 1) penyelenggaraan layanan jasa pelatihan reguler,
 - 2) penyelenggaraan layanan jasa pelatihan *in-house*.
- c. Kegiatan pemasarakatan standardisasi, melalui:
 - 1) Edukasi publik terkait SPK kepada regulator (Pemerintah Pusat dan Daerah)
 - 2) Edukasi publik terkait SPK kepada pelaku usaha dan LPK
 - 3) Edukasi publik terkait SPK kepada pakar/akademisi
 - 4) Edukasi publik terkait SPK kepada publik/konsumen
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, melalui:
 - 1) Pembinaan pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan SNI
 - 2) Pembinaan pelaku usaha dan masyarakat dalam penerapan SNI
 - 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Standardisasi Indonesia dalam forum internasional

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Kedeputian IPS tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Badan Standardisasi Nasional. Dengan demikian diharapkan berbagai kebijakan yang dihasilkan dapat meningkatkan persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui edukasi publik dan pemanfaatan sistem informasi SPK.

Untuk pencapaian visi dan misi Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan dilaksanakan melalui Program Pengembangan Standardisasi Nasional yang terdiri dari dua kegiatan Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, serta Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan (RKT) dan penetapan kinerja tahunan. Rencana strategis ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja di kedeputian IPS.

Renstra Kedeputian Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi ini merupakan turunan dari Renstra BSN yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kedeputian IPS BSN. Seluruh Unit Kerja yang ada di bawah Kedeputian IPS, diwajibkan untuk mempedomani dan menjabarkan Renstra Kedeputian IPS tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

LAMPIRAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Unit Organisasi	:	Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi
Tugas	:	melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasyarakatan standardisasi
Fungsi	:	<p>a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu</p> <p>b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu</p> <p>c. pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu</p> <p>d. penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi;</p>
Visi 2015 - 2019	:	Meningkatkan budaya standar di Masyarakat
Misi	:	Mengembangkan budaya standar, kompetensi dan sistem informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PEMASYARAKATAN STANDARDISASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / PERHITUNGAN	TARGET						SUMBER DATA	Penanggung Jawab Evaluasi
			2015	2016	2017	2018	2019	satuan		
Stakeholder Perspectives										
1 Meningkatnya daya saing produk berstandar	1 Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI	Indeks persepsi masyarakat dengan skala likert 1-5 (survei dapat dijadikan satu dengan IKU No. 3)	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	Skor	Survei oleh pihak ketiga	Pusdikmas
Customer Perspectives										
2 Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2 Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian	Indeks persepsi masyarakat dengan skala likert 1-5	3,5	3,8	4,0	4,3	4,5	Skor	Survei oleh pihak ketiga	Pusdikmas
	3 Indeks kepuasan pelanggan layanan informasi standardisasi dan pelatihan bidang SPK	Angka skor indeks - diperoleh melalui survei dengan (skala 100)	82	83	84	85	86	skor	Data hasil survei kepuasan pelanggan	Pusido, Pusdikmas
Internal Process Perspectives										
3 Meningkatnya budaya mutu	4 Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang SPK	500,000	550,000	605,000	665,500	732,000	orang	Data masyarakat yang mendapat edukasi baik online maupun offline dan berperan serta di bidang SPK dari seluruh Unit Kerja	Dep IPS (Pusdikmas)
	5 Jumlah akses informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis TIK	Jumlah akses terhadap informasi SPK	1,3 juta	1,4 juta	1,5 juta	1,6 juta	1,7 juta	akses	Data dari Pusido dan pusat-pusat lain yang melakukan akses informasi SPK	Dep IPS (Pusido)
Learning and Growth Perspectives										
4 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputy IPS yang profesional	6 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputy IPS yang meningkat kompetensinya	Jumlah ASN Deputy IPS yang mengikuti diklat/workshop/sosialisasi/lainnya sejenis ----- x 100% Jumlah ASN Deputy IPS	100	100	100	100	100	%	Data rekap ASN di lingkungan Dep. IPS yang mengikuti diklat/workshop/ sosialisasi/ lainnya sejenis	Pusdikmas, Pusido
	7 Realisasi anggaran Deputy IPS	Realisasi anggaran Deputy IPS sesuai SP2D ----- x 100% Pagu anggaran Deputy IPS	≥95	≥95	≥95	≥95	≥95	%	Data realisasi anggaran Dep. IPS sesuai SP2D	Pusdikmas, Pusido
	8 Jumlah e-governance yang mendukung tata kelola Deputy IPS	Jumlah sistem Aplikasi dan pengembangannya yang disediakan Deputy IPS dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas.(kumulatif)	5	7	9	11	13	Aplikasi	Data jumlah aplikasi yang disediakan dan dimanfaatkan di lingkungan Dep. IPS	Pusdikmas, Pusido